

## **LINK & MATCH PENDIDIKAN SEBAGAI IDEOLOGI NEOLIBERALISME (Analisis Wacana Tentang Dominasi Elit Dalam Pendidikan Kejuruan Di Indonesia)**

Hayu Mentari Precalya<sup>1</sup>, Darwan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Magister Sosiologi, Universitas Indonesia

---

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received 16 November 2021

Publish 16 November 2021

---

#### **Keywords:**

Link and Match Kurikulum  
Pendidikan,  
Pendidikan, Kurikulum,  
Pasar Kerja

---

### **Abstract**

Peserta didik melalui link and match kurikulum dibentuk sesuai kebutuhan pasar kerja era industri yang dikonstruksi oleh dominasi kelas elit. Penelitian ini menganalisis kesesuaian link and match kurikulum pendidikan dengan konstruksi dominasi kebutuhan elit dalam menciptakan peserta didik yang dibutuhkan pasar kerja era industri. Penelitian ini berfokus mengkaji kebijakan link and match dalam kurikulum pendidikan yang dipresentasikan dalam ideologi neoliberalisme dalam wacana-wacana pendidikan kejuruan di Indonesia. Landasan teori yang digunakan pada studi ini menggunakan pemikiran Michael W. Apple untuk menjelaskan eksklusivitas pendidikan dan dominasi kekuasaan pendidikan oleh elit. Pendekatan penelitian Critical Discourse Analysis, dengan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam. Kajian link and match pendidikan umumnya membahas mengenai efektivitas kebijakan dan dampak bagi sekolah, namun mengenai Critical Discourse Dominasi melalui link and match kurikulum pendidikan masih jarang diteliti.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### **Corresponding Author:**

Hayu Mentari Precalya

Program Magister Sosiologi, Universitas Indonesia

Email : [hayumentaripre@gmail.com](mailto:hayumentaripre@gmail.com)

---

## **1. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia sangat memperhatikan hubungan antara praktik pendidikan dan kebijakan pendidikan nasional yang memuat kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar penilaian. Dari aspek-aspek ini tentunya banyak kebijakan pendidikan yang dibuat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan pendidikan yang telah dibuat adalah *link and match* pada dunia pendidikan. *Link and match* adalah penggalan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. Diharapkan paradigma orientasi pendidikan tidak lagi *supply minded* tapi lebih *demand minded* (kebutuhan pasar).

*Link and match* berawal dari, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 29 Ayat 2, terkait instruksi untuk mempersiapkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tenaga siap kerja, menjadi dasar perancangan kebijakan *link and match*. Kemudian pada tahun 1993 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Wardiman Djojonegoro dan Menteri Tenaga

Kerja (Menaker) Abdul Latif, mencetuskan *link and match* yang bertujuan mencetak tenaga kerja mandiri dengan program bersama. *Link and match* terus dipakai, direvisi, dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan pokok regulasi pendidikan di Indonesia (SMK dari Masa ke Masa, <http://repositori.kemdikbud.go.id/>). Pada Permenperin No. 03/M-IND/PER/1/2017 *link and match* sebagai alternatif dalam menjebatani tingginya angka putus sekolah pada jenjang sekolah menengah, angka pengangguran, tingginya lowongan kerja tak terisi, dan rendahnya kualitas pekerja. Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten, diperlukan pendidikan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri. Tujuan *link and match* sebagai peningkatan kompetensi, kecakapan hidup (life skill), kapasitas sumber daya manusia, agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, terutama industri atau lebih sering disebut bersaing tingkat global (SMK dari Masa ke Masa, <http://repositori.kemdikbud.go.id/>). Sehingga nantinya lulusan dari sekolah menengah dapat mengurangi angka pengangguran terdidik, karena sudah diberikan bekal berupa ketrampilan untuk bekerja.

Kebijakan *link and match* sebagai bentuk alternatif dari strategi mengurangi pengangguran di Indonesia nyatanya bukan menjadi jawaban dari permasalahan pendidikan dan pengangguran. Kebijakan *link and match* disusun untuk menjawab kebutuhan pasar kerja pada era industri, harusnya pendidikan mampu menciptakan pasar kerjanya sendiri bukan mengikuti arus kebutuhan pasar kerja yang beralih pada teknologi, industri, dan globalisasi. Ini dibuktikan dari banyaknya lulusan SMK, Vokasi, dan Sarjana yang tidak bekerja sesuai dengan keahlian pendidikan yang diambil, ini dikarenakan terjadi kelebihan suplay tenaga kerja dari permintaan pasar kerja. Terjadi ketidak seimbangan antara jurusan pencari kerja dengan kesempatan kerja yang ditawarkan.

Konsep *link and match* justru menjadikan siswa sebagai modal manusia yang disiapkan menjadi calon pekerja yang dibekali dengan kompetensi-kompetensi melalui kurikulum yang ajarkan dalam intansi pendidikan. Ketika pendidikan dikaitkan dengan keterampilan dunia usaha, maka paradigma pendidikan berubah menjadi komersialisasi dan kapitalistik. Komersialisasi pendidikan dinormalisasi dan dinilai operasionalnya dilegalisasi. Pendidikan saat ini bukan agen yang efisien dalam mobilitas sosial lagi, individual yang kompetitif tidak lagi dilihat sebagai kebutuhan amoral melainkan sebagai atribut yang diinginkan dan diperlukan untuk terus menerus menemukan kembali wirausahawan (Apple,2001; Ball, 2003). Kurikulum pendidikan melalui *link and match* pendidikan hakikatnya harus memenuhi aspek yang dibutuhkan dominasi elit dalam pasar kerja era Industri. Kurikulum dikonstruksi sesuai dengan kebutuhan dominasi elit, ini akan berdampak pada output peserta didik yang tidak merata karna kesenjangan dalam fasilitas sekolah, letak geografi yang tidak sama, dan lainnya.

Hakikatnya *link and match* tidak sesuai dengan ideologi pendidikan, namun cenderung sebagai ideologi yang pro-pasar. *Link and match* membentuk peserta didik menjadi tenaga kerja yang dibutuhkan elit dominasi. Apple melihat bahwa pasar merupakan elemen yang sangat determinan dalam menggerakkan pendidikan. Sekolah melalui kurikulum menjadi institusi ekonomi yang melahirkan reproduksi pembagian kerja dalam mendukung hegemoni ideologi (Hidayat, Pengantar Sosiologi Kurikulum, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat sejauh mana wacana dominasi yang terdapat didalam penerapan *link and match* di Indonesia. Melalui penelitian ini dapat memahami jalannya pendidikan bertindak dalam sektor ekonomi masyarakat untuk mereproduksi aspek-aspek penting dari ketidaksetaraan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan analisis wacana kritis. Pendekatan kualitatif memfokuskan telaah pada makna-makna subjektif, pengertian-pengertian, metaphor-metafor, symbol-simbol, dan deskripsi-deskripsi ihwal suatu kasus spesifik yang hendak diteliti (Travers, 2001). Pendekatan ini dipilih agar studi ini

memperoleh gambaran detail dan mendalam informasi mengenai satu gejala sosial tertentu yang bersifat fenomenologis (Neuman, 1994). Objek kajian dalam penelitian ini adalah teks wacana yang berkaitan dengan *link and match* di Indonesia, itu berarti penelitian ini bersifat tekstual.

Analisis wacana bersifat kualitatif karena dasar dari metode ini bukan suatu analisis yang menggunakan perhitungan yang objektif, melainkan sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam menafsirkan objek penelitian. Metode ini biasa disebut sebagai pendekatan interpretatif

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *Link and Match* Pendidikan

*Link and match* merupakan upaya dari pemerintah untuk mempertemukan antara dunia pendidikan dengan dunia ketenagakerjaan. Dalam rangka penyiapan tenaga kerja industri yang terampil dan kompeten, diperlukan pendidikan berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri (PERMENPERIN NO. 03/M-IND/PER/1/2017). *Link and match* dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Prof. Dr. Wardiman, yang hakikatnya sebagai peningkatan mutu agar kompetensi siswa sesuai dengan tantangan globalisasi (Republika.Co.Id, 2008). *Link and match* adalah penggalan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. *Link dan match* mengisyaratkan agar para lulusan mempunyai wawasan atau sikap kompetitif, seperti etika kerja (*work ethic*), motivasi mencapai (*achievement motivation*), penguasaan (*mastery*), sikap berkompetensi (*competitiveness*), arti uang (*money beliefs*), sikap menabung (*attitudes to saving*) (Republika.Co.Id, 2008).

*Link and match* adalah penggalan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. Diharapkan paradigma orientasi pendidikan tidak lagi *supply minded* tapi lebih *demand minded* (kebutuhan pasar). Program *link and match* meliputi dua sasaran, yaitu pada tingkat sekolah menengah, dan pada tingkat perguruan tinggi. Khusus untuk sekolah menengah, sasaran program pemerintah mengubah proporsi siswa SMU vs SMK 70:30, menjadi 30:70. Sementara itu, pada tingkat perguruan tinggi diharapkan adanya peran industri untuk menciptakan pelatihan-pelatihan khusus bahkan bekerja sama untuk mendirikan institusi sesuai dengan jenis industri yang dikembangkan (Link and Match Dunia Pendidikan dan Industri, 2009).

#### Implementasi Kebijakan *Link and Match* dari Waktu ke Waktu

Pendidikan kejuruan menuntut lulusannya dapat siap pakai dan siap guna. Pendidikan kejuruan merupakan satuan pendidikan pada jalur vokasi formal jenjang menengah yang mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan dirinya dikemudian hari (Puskurbuk, 2011. <https://puskurbuk.kemendikbud.go.id>). Tuntutan dunia kerja terhadap penguasaan kompetensi untuk tenaga kerja menjadi suatu keharusan dalam memenangkan persaingan efektivitas dan efisiensi usaha. Penguasaan kompetensi harus mengarah pada kebutuhan dunia kerja yang tertuang dalam standar kompetensi (Puskurbuk, 2011. <https://puskurbuk.kemendikbud.go.id>). Sejak dicetuskannya pendidikan sistem ganda oleh Menteri Pendidikan Wardiman, maka terus disusun penyempurnaan pendidikan tepat guna bagi lulusan sekolah kejuruan agar dapat memasuki dunia kerja. Penyesuaian kurikulum bagi pendidikan kejuruan dilakukan terus-menerus dengan mengarah pada kebutuhan peningkatan daya saing sekaligus penguasaan kompetensi sebagai pembekalan pengembangan profesi dan pengembangan diri lulusan SMK (Puskurbuk, 2011. <https://puskurbuk.kemendikbud.go.id>). Berikut merupakan perkembangan tahapan kurikulum pendidikan sebagai bentuk penyesuaian dalam dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat ;

#### **Kurikulum 1994**

Perberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) maka semua upaya pendidikan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut (Lampiran III, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993, 25 Februari 1993). Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, menyatakan

bahwa yang dimaksud kurikulum adalah “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar”. Sesuai pengertian tersebut, maka kurikulum diwujudkan dalam tiga dokumen; 1. Landasan, program, dan pengembangan kurikulum; 2. Garis-garis besar Program Pengajaran (GBPP), dan; 3. Pedoman pelaksanaan kurikulum. Fungsi kurikulum sebagai petunjuk umum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan acuan bagi penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Lampiran III, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993, 25 Februari 1993).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro (1993-1998) pada tahun 1994 menetapkan kurikulum ini diseluruh Indonesia yang dikenal *objectif based curriculum*. Kurikulum 1994 juga merupakan awal diberlakukan sistem pembelajaran ganda. Dalam kurikulum 1994 terdapat beberapa kebijakan penting yang dikeluarkan (Abdullah, 2007). Pertama, berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Depdikbud tahun 1986 merekomendasi perlunya perintisan kurikulum nasional yang menjamin peluang dengan diisi muatan lokal. Kedua, kebijakan pendidikan dasar 9 tahun mulai dikembangkan melalui program wajib belajar 9 tahun. Ketiga, Rakernas 1990 merekomendasikan perlunya pembenahan materi pelajaran P4, PMP, dan PSPB. Hasilnya, mata pelajaran PSPB dihapuskan. Mata pelajaran PMP berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Penjurusan di SMA dibagi atas tiga jurusan yaitu IPS, IPA, dan Bahasa. Pada kurikulum ini mulai diperkenalkan program pendidikan sistem ganda (psg) di SMK.

Tujuan yang terdapat dalam kurikulum ini, terbagi dalam dua program pembelajaran; tujuan per kelas dan tujuan per pokok bahasan atau beberapa pokok bahasan. Tujuan per kelas merupakan tujuan pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Tujuan ini sejumlah kemampuan dan perilaku yang diharapkan dicapai oleh siswa. Tujuan perpokok bahasan merupakan tujuan pembelajaran yang mengandung kemampuan dan perilaku (pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai) yang harus dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar digunakan pendekatan kemampuan, diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar siswa mampu mengembangkan potensi (Lampiran III, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 061/U/1993, 25 Februari 1993).

#### **Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004**

Pada masa Abdul Malik Fajar sebagai Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004), maka sejak tahun 2001 disusunlah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk menggantikan kurikulum 1994. Kurikulum ini mengacu pada UU No.22 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom. Berikut merupakan kebijakan pada kurikulum 2004 yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Ujian Akhir Nasional (UAN) (Depdikbud, 1994)

#### **Kurikulum KTSP**

Untuk mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah memprogramkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai tindak lanjut dari pembaruan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Kurikulum ini diberlakukan mulai tahun 2006/2007. Dalam kurikulum ini pemerintah hanya sebagai pengembang kompetensi standar isi dan kelulusan, selanjutnya sekolah bebas menyusun kurikulum sesuai dengan keadaan sekolah dan siswa didik. Pendekatan belajar KTSP berbasis materi, jam belajar dan struktur program. KTSP ini merupakan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan (kognitif, afektif dan psikomotorik).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal 1 Ayat (15) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah “Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.” KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 (KBK) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah (Muslich, 2007:17).

Implementasi KTSP menuntut kemampuan sekolah dengan cara memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum, karena masing-masing sekolah lebih mengetahui tentang kondisi satuan pendidikannya. KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam rangka mengefektifkan belajar-mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Otonomi disini lebih ditekankan dalam hal satuan pendidikannya (sekolah). Sekolah diberi wewenang penuh dalam mengatur jadwal dan jam belajar peserta didik, namun masih dalam aturan/koridor dan kerangka yang sudah dibuat oleh pemerintah. Wewenang tersebut dilakukan oleh BSNP. BSNP merupakan Badan Standar Nasional Pendidikan yang memiliki otoritas diantaranya mengatur serta mengelola isi, proses dan lulusan pendidikan.

### **Kurikulum 2013**

Penerapan Kurikulum 2013 oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dasar pengembangan dalam Kurikulum 2013 adalah model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang diterapkan untuk satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Dalam kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013, <https://www.kemendikbud.go.id> ) Pada pendidikan kejuruan, Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang memuat muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan terdiri atas dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian serta alokasi waktu untuk tiap mata pelajaran (Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <https://www.kemendikbud.go.id>

### **Link and Match sebagai Dominasi Ideologi dan Politik**

Michael Apple menjelaskan keterkaitan atau relasi antara pengetahuan dan kekuasaan dalam pendidikan. Kekuasaan dan ketidakadilan yang tercermin dalam kurikulum. Kurikulum merupakan arena pertarungan ideologi dalam konteks pendidikan. Dalam beberapa gagasannya, Apple mengakui banyak memiliki keterkaitan pemikiran dengan beberapa intelektual seperti Pierre Bourdieu, Luis Althusser, Baudelot, Basil Bernstein, Antonio Gramsci, Bowles dan Gintis yang memandang bahwa sistem pendidikan dan budaya merupakan elemen yang sangat penting dalam pemeliharaan hubungan yang ada dari dominasi dan eksploitasi dalam masyarakat (Apple M. W., *Ideology and Curriculum*; Second Edition, 1990). Menurut Apple, sekolah tidak hanya mengontrol orang dalam berperilaku, tetapi sekolah berperan mengontrol makna dari produksi pengetahuan yang ada dalam kurikulum. Proses kontrol makna tersebut dapat dilakukan oleh kelompok dominan maupun ideologi dominan. Oleh karena itu, kelompok dominan tersebut beranggapan bahwa semua murid dan individu yang ada di sekolah harus menerima pengetahuan yang disebarkan kelompok dominan (Hidayat, *Pengantar Sosiologi Kurikulum*, 2013)

Apple dalam bukunya *Ideology and Education* dijelaskan peran sekolah sebagai tenaga reproduksi yang timpang di masyarakat. Ada praktik rasisme yang berlangsung di sekolah. Praktik ini, mempertahankan kelompok minoritas tersebut dalam struktur sosial yang rendah dan terus diproduksi (Apple M. W., 1990; Hidayat, *Pengantar Sosiologi Kurikulum*, 2013). Dalam hal ini, kurikulum yang dijalankan sekolah sebagai praktik rasisme yang terlembagakan. Kurikulum

bukanlah sesuatu yang *taken for granted* atau diterima begitu saja tanpa ada pertanyaan kritis lebih lanjut. Apple menempatkan kurikulum erat hubungannya dengan kekuasaan (politik) dan ideologi baik didalam sekolah maupun diluar sekolah. Relasi struktur kekuasaan memiliki kaitan dengan isi kurikulum. Apple menjelaskan terjadi mekanisme selektif sekelompok kelas sosial tertentu yang melahirkan ketimpangan sosial ekonomi (Hidayat, Pengantar Sosiologi Kurikulum, 2013).

### **Neoliberalisme Pendidikan dalam *Link and Match***

Neoliberalisme pendidikan yang berkembang saat ini, lebih memperhatikan pada teknologi tinggi, teknologi industri dan informasi, dan layanan ekonomi (Rich, 1986). Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan neoliberalisme mengutamakan sumber daya manusia sebagai fokus utama untuk menciptakan tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Sejarah neoliberalisme pendidikan bermula dari pertemuan pasca perang dunia ke-2 yang dikenal dengan pertemuan *Breeton Woods*, pertemuan dilakukan karena pasca perang dunia ke-2 banyak negara mengalami kesulitan ekonomi karena kehabisan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Pertemuan yang dihadiri oleh 44 negara Amerika menawarkan proposal untuk melakukan deregulasi, dan pereduksian peran pemerintah atau dengan kata lain liberalisasi bidang jasa (Anggiat P.Simamora, 2014). Pertemuan tersebut juga melahirkan perjanjian GATS (*General Agreement On Trade In Services*) perjanjian yang menyetujui bahwa negara-negara yang setuju akan melakukan liberalisasi bidang jasa terutama perdagangan, agrikultur, kekayaan intelektual dan pendidikan. GATS menjadi fondasi dari badan dagang internasional WTO (*World Trade Organization*) yaitu sebuah badan/ organisasi yang mengatur mengenai tata cara, transaksi, tarif dan skema perdagangan antara negara-negara anggota (Butt, 1978).

GATS mengintegrasikan regulasi nasional sebagai bagian dari proses liberalisasi yang ditempuh negara anggota. Tujuan pokoknya adalah agar negara-negara membuat atau mengembangkan aturan-aturan domestik yang ramah pasar, tidak menciptakan hambatan-hambatan yang tidak perlu (*unnecessary barriers*) bagi perdagangan jasa (Warouw, 2006). Dampak tersebut amat bervariasi tergantung dari lokasinya di arena global, dapat membuka peluang atau menguntungkan tetapi dapat juga merupakan hambatan atau merugikan sektor pendidikan negara berkembang. WTO dan GATS memang tidak secara eksplisit menyatakan penarikan tanggungjawab pemerintah atas dunia pendidikan, namun pola dan strategi implementasi, juga globalisasi dan ideology yang berada dibaliknya menarik peran negara dalam memenuhi tanggungjawab atas dunia pendidikan (Darmaningtias, 2014).

Tidak hanya sampai pada pembentukan GATS, neoliberalisme juga dilegalkan dengan dibentuknya Global Education Reform Movement (GERM). Ini merupakan gerakan reformasi pendidikan di berbagai negara di dunia sebagai perubahan dari paradigma pembangunan pada tahun 1980 (Resistensi Finlandia Terhadap Global Educational Reform Movement, 2015). Melalui peran institusi pembangunan internasional, seperti Bank Dunia, WTO, dan IMF, gerakan GERM mampu menjadi sebuah ortodoksi kebijakan pendidikan diberbagai negara. Reformasi neoliberalisme pendidikan kemudian marak dilakukan di berbagai negara terutama negara Anglo-Saxon (Inggris, Australia, dan Selandia Baru). Reformasi ini menekankan adanya perubahan pada pengelolaan sektor pendidikan menjadi lebih fleksibel dan mampu memenuhi kebutuhan sektor Industri yang dihasilkan pendidikan (Karsten, 1999).

Indonesia sendiri mulai aktif menjadi anggota GATS sejak tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) Agreement Establishing the World Trade Organization (Idrus, 2006). Sejalan dengan ini, Indonesia melakukan revisi bidang pendidikan agar sejalan dengan tujuan dari WTO dan GATS. Kurikulum dan konsep pendidikan menjadi poin penting dalam penyelarasan dengan ideologi WTO dan GATS. Kebijakan *link and match* pendidikan menjadi salah satu kebijakan yang dijalankan selaras dengan tujuan-tujuan GATS. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 Pasal 29 Ayat 2, terkait instruksi



untuk mempersiapkan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tenaga siap kerja, menjadi dasar perancangan kebijakan *link and match*. Kemudian pada tahun 1993 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Wardiman Djojonegoro dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Abdul Latif, mencetuskan *link and match* yang bertujuan mencetak tenaga kerja mandiri dengan program bersama. *Link and match* terus dipakai, direvisi, dan disesuaikan dengan tujuan-tujuan pokok regulasi pendidikan di Indonesia (SMK dari Masa ke Masa, <http://repositori.kemdikbud.go.id/>).

Neoliberalisme pendidikan akan mengubah identitas pendidikan menjadi menganggap pendidikan sebagai pemaksimal keuntungan. Kecenderungan *link and match* dengan neoliberalisme pendidikan membuat pendidikan kejuruan hanya memiliki fokus ekonomi saja. *Link and match* penekanannya lebih kepada hubungan pendidikan dengan dunia industri, pendidikan harus menciptakan manusia siap pakai bagi industri. Sehingga diciptakannya kebijakan-kebijakan pendorong untuk melegalkan keberlangsungan *link and match* pada dunia pendidikan. Artinya, pendidikan hanya membentuk manusia patuh dalam menyelesaikan kompetensi-kompetensi yang telah disusun, tanpa mempertanyakan tujuan dari pembelajaran yang ditempuh. Pendidikan disempitkan untuk memenuhi kepentingan industri dan pasar kerja. Kepatuhan dihargai lebih tinggi dari kreativitas dan inovasi. Kompetisi untuk menjatuhkan dihargai lebih tinggi, dari pada kerjasama yang berpijak pada solidaritas (Giroux, 2011).

Penerapan *link and match* yang lebih mengarah pada dunia ekonomi, menyadarkan kita bahwa pendidikan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi namun ada hal luas dan kompleks tujuan pendidikan yang harus dicapai. Sistem kontrol dominasi elit pada *link and match* pendidikan yang diterapkan pada kurikulum sekolah menunjukkan sifat kekuasaan yang membatasi hakikat sekolah sebagai agen transfer pengetahuan. Kekuasaan yang dipegang oleh dominasi elit menciptakan wacana yang mampu memengaruhi praktik sosial dalam pendidikan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan yang dianut (dipaksakan) pada struktur dan sistem pendidikan. Tidak ada relasi kekuasaan tanpa konstitusi korelatif yang berhubungan dengan pengetahuan; atau pengetahuan akan membentuk hubungan kekuasaan di waktu yang sama (Darmaningtias, 2014). Pendidikan hakikatnya memiliki jangkauan yang lebih luas, yaitu membuka wawasan tentang dunia yang lebih luas, mengajarkan penalaran yang logis membangun kepercayaan diri yang kuat sebagai individu maupun bangsa, menumbuhkan kemandirian dalam bersikap, memanusiasikan manusia (driyarkara) atau dalam terminology Ki Hadjar Dewantara adalah menumbuhkan manusia merdeka dan berbudaya. Dengan memaknai tujuan pendidikan yang lebih luas, maka praksis pendidikan nasional tidak terjebak pada simplifikasi yang dibuat oleh kekuatan capital global, yang kedar memberikan kompetensi tertentu agar mampu berkompetensi di tingkat global. Doktrin bahwa pendidikan yang baik adalah yang mampu menghantarkan lulusnya bersaing ditingkat global merupakan bukti dari suatu sistem pendidikan yang amat terkontaminasi oleh ideology pasar bebas atau kapitalisme (Darmaningtias, 2014, pp. 37-39)

### **Ideologi *Link and Match***

Permasalahan dalam mengurangi pengangguran muda diharapkan bisa terjawab dengan hadirnya *link and match* dalam dunia pendidikan kejuruan. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia industri, memfokuskan pada satu juta tenaga kerja industri tersertifikat hingga tahun 2019. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016, bahwa Kementerian Perindustrian ditugaskan meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja lapangan dan magang industri bagi guru (Targetkan Satu Juta Tenaga Kerja, Kemenperin Lanjutkan *Link and Match*, 2017, <http://www.kemendikbud.go.id/publikasi/siaran-pers>). Raymond Williams (Apple M. W., *Ideology and Curriculum*; Second Edition, 1990) dalam analisis kritisnya tentang distribusi sosial budaya menjelaskan rumusan umum yang meletakkan pendidikan sebagai perubahan telah

mengabaikan fakta bahwa bentuk dan muatan pendidikan dipengaruhi dan ditentukan oleh sistem aktual keputusan (politik) dan pengelolaan (ekonomi) (Apple M. W., *Ideology and Curriculum; Second Edition*, 1990). Program-program *link and match* menitikberatkan pada kebutuhan kerja industri membuat fokus pendidikan sebagai alat mendapatkan pekerjaan. Kurikulum SMK dirancang untuk membentuk suatu keahlian dan kompetensi sebagaimana persyaratan oleh dunia kerja dan perkembangan untuk masa depan. Hal ini berdampak pada produk pendidikan yang dihasilkan tidak memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap realitas sekitarnya, karena fokus utamanya dalam menempuh pendidikan adalah mendapatkan pekerjaan (Restorasi Pendidikan Indonesia, 2017). Konstruksi kurikulum, mengungkapkan tidak hanya politik yang terlibat didalam kontrol kurikulum, tetapi ada ketidakedemokrasian yang diintervensi dari ekonomi kedalam sistem sekolah (Apple M. W., *Ideology and Curriculum; Second Edition*, 1990).

Tujuan awal dari pendidikan kejuruan untuk mengembangkan keterampilan tertentu sehingga dengan keterampilan yang dimilikinya, para siswa kelak sebagai warga negara akan turut mengambil bagian untuk meningkatkan harga diri dan martabat bangsa sebagai bangsa yang berbudaya dan beradab (SMK DARI MASA KE MASA, 2015). Saat ini pendidikan kejuruan berfokus pada mencipatakan lulusan yang memiliki kompetensi keahlian dalam dunia kerja. *Link and match* sebagai implementasi agar terjadi kesinambungan dalam pendidikan kejuruan dan dunia kerja. Direktur Pembina SMK ke-6 Jorlin Pakpahan dalam buku susunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, SMK Dari Masa Ke Masa.

“...*Link and match* ke dalam program-program pendidikan kejuruan dengan tujuan agar proses, program, dan hasil pendidikan SMK lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Mendifusikan perubahan orientasi dalam pengelolaan pendidikan kejuruan yang meliputi 10 butir, antara lain perubahan dari supply-driven ke demand-driven, pengembangan program berbasis kompetensi, menghilangkan sekat yang memisahkan sekolah dan dunia usaha/ industri, menggagas sistem multi-entry-exit dan sertifikasi kompetensi, serta menggalakan Unit Produksi...”

Kecendrungan *link and match* terhadap dunia industri dan pasar kerja sejak awal pembentukannya membuat *link and match* dibuat untuk mendukung pendidikan liberalisme yang melahirkan reproduksi pembagian kerja dan berkontribusi dalam penanaman hegemoni ideologi. Pengetahuan tidak pernah netral dan empiris, hubungan objektif dengan yang nyata. Pengetahuan adalah kekuatan, dan sirkulasi pengetahuan adalah bagian dari distribusi kekuasaan sosial (Apple M. W., *Cultural politics and the text*, 2004). Apple melihat bawah pasar merupakan elemem yang sangat penting determinan dalam menggerakkan pendidikan, khususnya menelaah kurikulum (Hidayat, *Prespektif Sosiologi tentang Kurikulum*, 2011). Dalam tulisan ini melihat *link and match* yang dimuat dalam kurikulum pendidikan merupakan representasi dari hubungan relasi yang diciptakan oleh dunia pendidikan dan industri kapitalis. Adanya wacana dominasi yang mempengaruhi praktik *link and match* dalam kurikulum pendidikan kejuruan, ini dilihat dari konteks kompetensi pembelajaran, program pembelajaran, target yang dicapai lulus yang dimuat dalam kurikulum pendidikan kejuruan.

#### 4. KESIMPULAN

Sistem pendidikan telah beralih menjadi berorientasi pada kebutuhan pasar dan industri, meskipun tujuan baiknya kualitas sistem pendidikan ini dinilai dapat menjadi jalan keluar bagi pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi suatu negara (Martono, 2014). Fungsi pendidikan dalam perubahan sosial untuk meningkatkan kemampuan analisis kritis berperan sebagai cara menanamkan keyakinan dan nilai baru tentang cara berpikir manusia. Pendidikan kritis nantinya dapat menciptakan generasi baru dengan daya kreasi dan kemampuan berpikir kritis, sikap tidak mudah menyerah pada situasi yang ada dan tanggap terhadap perubahan yang ada (Freire, 2002). Pengaruh dan upaya berpikir kritis dapat memberikan modifikasi (perubahan) hierarki sosial



ekonomi. Oleh karena itu pengembangan berpikir kritis bukan saja efektif dalam pengembangan pribadi seperti sikap kritis, tetapi lebih berpengaruh terhadap penghargaan masyarakat akan nilai manusiawi, perjuangan ke arah persamaan hak-hak politik, sosial, maupun ekonomi.

### **SARAN**

Perencanaan pendidikan berkaitan dengan berbagai tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat, baik dalam masalah sosial maupun ekonomi. Artinya perencanaan pendidikan harus mengembangkan pola-pola yang mengaitkan pendidikan dengan aspek perkembangan sosial ekonomi. Dalam membangun pendidikan sosial setiap masyarakat harus memiliki kesadaran tinggi dan rasa tanggung jawab dalam menetapkan tujuan-tujuan pendidikan, metode-metode pengajaran maupun tehnik-tehniknya, dan harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, budaya maupun tradisi yang dianut.

SMK dapat dijadikan sebagai pusat studi yang ramah lingkungan dan menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih sederhana, bukan terfokus dalam objek pengetahuan luas yang memuaskan kepentingan dan kebutuhan industri dan pasar kerja. Kajian ini tidak hanya sebagai pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan potensi daerah, namun juga menjadi jalan keluar dari permasalahan pengangguran dan lainnya. Lulusan sekolah kejuruan diharapkan dapat memahami proses belajar dan pemecahan masalah dari produk-produk yang akan dihasilkan. Hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan usaha diri, sehingga individu dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan mengerti peran dalam masyarakat.

### **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan rasa syukur kepada Allah S.W.T atas perkenannya saya dapat menyelesaikan tulisan ini. Selanjutnya, saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Lucia Ratih Kusumadewi, S.Sos., D.E.A. yang telah berkontribusi memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

### **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Anggiat P. Simamora, B. N. (2014). Liberalisasi Pendidikan Dalam Kerangka GATS : Kajian Hukum Dalam Pendirian Perguruan Tinggi Asing Di Indonesia. *USU Law Journal* , 67-89.
- Apple, M. W. (1990). *Ideology and Curriculum; Second Edition*. London: Routledge.
- Apple, M. W. (2004). Cultural politics and the text. In S. J. Ball, *The RoutledgeFalmer Reader in Sociology of Education* (pp. 177-187). London : RoutledgeFalmer.
- Butt, F. R. (1978). *Public Education in the United States: from revolution to Reform*. New York: Rinehart and Winston.
- Darmaningtias, E. S. (2014). *Melawan Liberalisasi Pendidikan*. Malang: Madani.
- Freire, P. (2002). *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giroux, H. (2011). *On Critical Pedagogy*. London: The Continuum International Publishing Group.
- Hidayat, R. (2011). Prespektif Sosiologi tentang Kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* , 178-188.
- Hidayat, R. (2013). *Pengantar Sosiologi Kurikulum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Idrus, M. (2006). Pro Kontra Liberalisasi Pendidikan. *UNISIA*, 177-185.
- Indonesia, K. P. (2015). *SMK DARI MASA KE MASA*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Karsten, S. (1999). Neoliberal Education Reform in The Netherlands. *Comparative Education*, 303-307.

- Link and Match Dunia Pendidikan dan Industri . (2009). In E. S. dkk (Ed.), *Link and Match Dunia Pendidikan dan Industri Dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dan Industri* (p. 1). Jakarta: LIPI.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Neuman, L. (1994). *Social Researchs Methods; Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Putra, A. K. (2015). Resistensi Finlandia Terhadap Global Educational Reform Movement. *Universitas Airlangga*.
- Republika.Co.Id. (2008). *Wardiman : Dunia Pendidikan Harus Link and Match*. Surabaya: <https://nasional.republika.co.id/>.
- Rich, J. M. (1986). Neoliberalism and Black Education. *The Journal of Negro Education* , 21-28.
- Travers. (2001). *Qualitative Researchs Through Case Studies* . London: Sage Publication.
- UNJ, T. K. (2017). Restorasi Pendidikan Indonesia. In E. Sriadi, *Pendidikan mengejar Pasar* (p. 29). Jakarta : Ar-Ruzz Media.
- Warouw, A. (2006). GATS dan Regulasi Nasional Masalah Rekonsiliasi Dua dan Kepentingan. *Jurnal Hukum Internasional*, 552-579.